

MINDFULNESS DALAM KOMUNIKASI ANTARETNIS*

Studi ini diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana setiap orang dari dua kelompok etnis yang berbeda dapat menegosiasikan identitas kultural mereka dalam sebuah ruang sosial yang memungkinkan mereka bertemu, berkomunikasi, dan saling mempengaruhi. Dengan pendekatan fenomenologi, studi ini mengkombinasikan metodologi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji. Model triangulasi yang dipakai adalah the dominant-less dominant design, yaitu paradigma dominan (interpretif) dilengkapi satu komponen kecil paradigma alternatif (positivisme). Studi menghasilkan konstruksi bangunan komunikasi yang memungkinkan kedua kelompok etnis menjalin interaksi yang setara sebagai hasil dari negosiasi identitas kultural.

Ketidakmampuan masyarakat memahami keberagaman kultural dan munculnya ketimpangan sosial-ekonomi menyebabkan terjadinya pertikaian antarkelompok. Konflik SARA, terutama pertikaian antaretnis, terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.

Pelbagai peristiwa konflik yang terjadi, beberapa di antaranya telah mencapai tataran prasangka yang paling tinggi: *eksterminasi*, yaitu ekspresi prasangka yang diwujudkan dalam bentuk hukuman mati tanpa peradilan (*lynchings*), pembunuhan massal yang terorganisasi (*pogroms*), pembunuhan besar-besaran (*massacres*), dan pemusnahan terhadap kelompok etnis tertentu (*genocides*). "Peristiwa Mei 1998" (konflik rasial anti-Cina), "Peristiwa Sanggau Ledo, Sambas, Sampit" (pertikaian antaretnis: Dayak/Melayu

¹Penulis adalah staf pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.

²Artikel ini merupakan ringkasan disertasi penulis untuk program pascasarjana Universitas Indonesia.

dengan Madura), dan "Peristiwa Ambon, Poso" (konflik antaragama) merupakan bukti nyata yang menunjukkan adanya perilaku eksterminasi tersebut.

Mengapa terjadi kekerasan? Dalam perspektif komunikasi, sebagai bagian dari masyarakat multikultur, kita selama ini belum pernah melakukan komunikasi antarbudaya yang efektif. Komunikasi yang berlangsung selama ini cenderung tidak mencerminkan adanya ketulusan dari kedua belah pihak, yaitu komunikasi yang tidak menyampaikan pesan yang sebenarnya (Oetama, 2000).

Ketidaktulusan berkomunikasi dicerminkan oleh konsep *mindlessness*, yaitu orang yang sangat percaya pada kerangka referensi yang sudah dikenal, kategori-kategori rutin, dan cara-cara melakukan sesuatu yang sudah lazim (Ting-Toomey, 1999). Artinya ketika melakukan kontak antarbudaya dengan orang lain (*stranger*), individu yang berada dalam situasi *mindless* menjalankan aktivitas komunikasinya seperti *automatic pilot* yang tidak dilandasi kesadaran dalam berpikir. Konsep lain yang terkait dengan *mindlessness* adalah *emotional vulnerability*. Ketika seseorang berkomunikasi dengan *dis-similar others*, maka ia akan mengalami *emotional vulnerability*, yaitu identitas kelompok (identitas kultural) dan identitas individu (sifat-sifat kepribadian) akan mempengaruhi tindakan orang itu dalam mempersepsikan, berpikir, dan berperilaku dalam lingkungan kultural sehari-hari.

Guna mencapai situasi yang *mindful* dalam berkomunikasi, maka setiap individu perlu menyadari bahwa ada perbedaan dan kesamaan dalam diri mereka sebagai anggota kelompok budaya tertentu. Langer (dalam Ruben & Stewart, 1998) mengatakan bahwa *mindfulness* terjadi ketika setiap orang 1) memberikan perhatian pada situasi dan konteks; 2) terbuka terhadap informasi baru; dan 3) menyadari adanya lebih dari satu perspektif.

Dalam cara pandang komunikasi antarbudaya, konflik yang terjadi berulang kali di Indonesia menjadi satu pertanda bahwa situasi *mindless* masih mewarnai komunikasi antaretnis yang berlangsung selama ini. Setiap orang dari kelompok etnis yang berbeda lebih bersikap reaktif daripada proaktif, dan menginterpretasikan perilaku kelompok etnis lain berdasarkan cara pandang dari kelompok etnisnya. Dalam situasi komunikasi yang terpolarisasi ini (*polarized communication*)—yaitu ketidakmampuan memahami pandangan yang berbeda dari pihak lain—tidak ada lagi penghargaan terhadap keberadaan kelompok etnis yang lain.

Keberadaan komunitas etnis Cina di Indonesia hingga sekarang masih menjadi persoalan. Mereka belum bisa diterima secara penuh sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Di kalangan warga masyarakat etnis non-Cina masih berkembang pandangan yang tidak menguntungkan terhadap keberadaan warga etnis Cina.

Pelbagai hal yang berkaitan dengan "masalah Cina" di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai Presiden Abdurrahman Wahid secara skematis dapat dirumuskan berdasarkan pada aspek-aspek politik, ekonomi, kultural, dan hukum berikut ini.

Peta "Masalah Cina" Di Indonesia

Bidang	Pemerintahan	Masalah
Politik	Hindia Belanda	Stratifikasi sosial yang diskriminatif: Eropa, Timur Asing, Pribumi .
	Orde Lama	Munculnya 2 arus pemikiran yang berbeda: asimilasi atau integrasi/akomodasi.
	Orde Baru	Asimilasi sebagai solusi nasional: usaha mereduksi ciri-ciri kecinaan. <i>Stigmatisasi</i> : istilah 'Tionghoa' diganti dengan 'Cina' (SE Presidium Kabinet Ampera RI No. SE-06/Pres.Kab./6/1967). <i>Marjtnalisasi</i> : keturunan Cina harus keluar dari lingkaran tengah warga mayoritas (sistem kuota sekolah rasio 60 : 40 dan larangan segala aktivitas kebudayaan Cina). <i>Viktimsasi</i> : praktik-praktik pemerasan.
Ekonomi	Hindia Belanda	Monopoli penjualan candu, perantara jual beli pemerintah - pribumi, dan hak menungut pajak.
	Orde Lama	Larangan berdagang di tingkat pedesaan (Perpu No. 10 Tahun 1960).
	Orde Baru	Akumulasi dan pendayagunaan modal etnis Cina dengan alasan pemulihan ekonomi.
Kultural		Sikap etnosentris warga etnis Cina, menganggap kebudayaan Cina sebagai kebudayaan yang tertua di dunia.Islam sebagai agama mayoritas warga di Indonesia masih diidentikkan dengan

Hukum	Orde Lama Orde Baru Reformasi	Perpu No. 10 Tahun 1960: larangan berdagang di tingkat pedesaan. Pelarangan sekolah dan penerbitan berbahasa Cina. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966: pergantian nama. Inpres No. 14/1967: pelarangan terhadap agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Keppres No. 240/1967: kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967: kebijakan pokok penyelesaian masalah Cina. Keppres No. 6/2000 tentang pencabutan Inpres No. 14/1967.
-------	-------------------------------------	--

Di tengah pertikaian antaretnis dan konflik SARA lain yang semakin sering, penonjolan identitas kultural Cina yang dimungkinkan lewat penerbitan Keppres No. 6 tahun 2000 berpotensi bagi munculnya masalah baru dalam relasi antaretnis. Namun di sisi yang lain, penekanan pada identitas nasional yang bersifat mengatasi identitas kultural akan mengingkari subyektivitas etnis Cina.

Masalah pengakuan identitas kultural (Cina) tidak bisa diabaikan arti pentingnya bagi relasi antaretnis, khususnya bagi hubungan antara etnis Cina dengan pribumi (Thung Ju Lan dalam I. Wibowo (ed.), 2000). Pengakuan terhadap keberadaan identitas kultural etnis Cina penting artinya bagi subyektivitas setiap individu etnis Cina, dan bagi interaksi sosial dengan sesama etnis maupun dengan mereka yang nonetnis Cina. Tanpa pengakuan tersebut, subyektivitas yang bersangkutan menjadi tidak jelas, sehingga loyalitasnya pun dipermasalahkan, seperti yang dialami etnis Cina di Indonesia selama ini.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan dalam studi ini adalah:

- 1) Konflik yang terjadi dan melibatkan eksistensi warga etnis Cina menjadi pertanda bahwa hubungan antara etnis Cina dengan etnis non-Cina masih berada dalam situasi *mindless*. Mengapa keadaan ini masih terjadi dan usaha apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi komunikasi yang *mindful*?
- 2) Hal apa saja yang bisa memberikan kontribusi bagi terciptanya komunikasi antaretnis yang *mindful*?
- 3) Sejauhmana etnosentrisme, prasangka, dan stereotip (*intercultural inhibitors*) berpengaruh terhadap usaha menciptakan komunikasi antaretnis yang *mindful*?

- 4) Pengakuan identitas kultural penting bagi subyektivitas warga etnis Cina. Sebagai kelompok etnis yang sudah turun-temurun menetap di Indonesia, mengapa keberadaan mereka masih menjadi persoalan?
- 5) Bangunan komunikasi apa yang dapat menjadi sarana bagi hubungan yang setara antara etnis Cina dengan etnis non-Cina?

■ SIGNIFIKANSI STUDI

Dalam tataran praktis studi ini diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana setiap orang dari dua kelompok etnis yang berbeda dapat menegosiasikan identitas kultural mereka dalam sebuah *ruang sosial* yang memungkinkan mereka bertemu, berkomunikasi, dan saling mempengaruhi. Di samping itu studi ini juga diharapkan bisa mengkonstruksikan bangunan komunikasi yang memungkinkan kedua kelompok etnis menjalin interaksi yang setara sebagai hasil dari negosiasi identitas kultural.

Secara akademis/teoritis studi ini merupakan usaha untuk mengembangkan pemikiran teoritis tentang bangunan komunikasi yang sesuai bagi relasi antara kedua kelompok etnis. Dalam konteks Indonesia keberadaan bangunan komunikasi antarbudaya menjadi penting, sebab selama ini belum atau tidak ada model komunikasi yang secara teoritis dapat menjadi landasan berpikir bagi terciptanya komunikasi antaretnis yang efektif, yaitu komunikasi yang bertujuan meminimalisasikan kesalahpahaman budaya.

Dalam lingkup teknis/metodologis studi ini merupakan usaha menerapkan prinsip triangulasi, yaitu refleksi suatu aktivitas untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji melalui penggunaan lebih dari satu metode.

■ KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Dalam tataran teoritis makro, studi ini merujuk gagasan *genre* interpretif, yaitu pemikiran teoritis yang berusaha menjelaskan suatu proses dengan pemahaman (*understanding*) dan membuat perbedaan yang tajam antara pemahaman dengan penjelasan ilmiah (Littlejohn, 1999). Sejalan dengan gagasan *genre* interpretif yang menekankan pengalaman subyektif dalam memahami suatu fenomena, maka studi ini berusaha menerapkan pemikiran paradigma *pluralist* tentang heterogenitas masyarakat dalam memahami realitas. Gagasan paradigma *pluralist* ini merupakan cerminan sifat manusia yang memiliki kehendak bebas dan berpikir secara rasional (Perdue, 1986). Di samping itu, studi ini juga merujuk gagasan

pendekatan *subjectivist* yang berusaha menjelaskan fenomena yang dikaji dari dalam (*understanding, verstehen*). Komunikasi, dalam perspektif *subjectivist*, hanya dapat dipahami dari sudut pandang partisipan komunikasi, mereka memiliki "otonomi" dan "kehendak yang bebas" (Asante & Gudykunst, 1989).

Pendekatan teoritis yang sejalan dengan perspektif makro di atas adalah fenomenologi. Asumsi pokok fenomenologi adalah bahwa orang secara aktif akan menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna terhadap apa yang mereka lihat. Interpretasi (*understanding, verstehen*) merupakan proses aktif dalam memberikan makna terhadap sesuatu yang diamati seperti teks, tindakan, atau situasi yang semuanya dapat disebut sebagai pengalaman (*experience*). Komunikasi dalam tradisi fenomenologi dipahami sebagai pertukaran pengalaman pribadi melalui aktivitas dialog (Craig dalam Littlejohn, 2002).

Dalam studi komunikasi antarbudaya, gagasan teoritis yang menggunakan pendekatan fenomenologi adalah *co-cultural theory* dari Orbe (dalam Gudykunst & Mody, 2002). Teori ini menjelaskan bahwa dalam bentuk yang paling umum, komunikasi *co-cultural* merujuk interaksi antara para anggota kelompok *underrepresented* dengan kelompok dominan. Para anggota kelompok *underrepresented* memiliki satu dari tiga tujuan ketika berinteraksi dengan para anggota kelompok dominan, yaitu *assimilation* (menjadi bagian kultur dominan), *accomodation* (pengakuan kelompok dominan terhadap keberadaan para anggota *underrepresented*), atau *separation* (menolak kemungkinan ikatan bersama dengan para anggota kelompok dominan).

Landasan teoritis untuk menciptakan *mindfulness* dalam komunikasi antarbudaya adalah pemikiran filsuf dan teolog Martin Buber yang dikenal dengan *Dialogic Ethics* (Bertens, 2002; Griffin, 2000). Ia mengkontraskan dua tipe relasi, yaitu *I-It* (Aku-Itu) dan *I-Thou* (Aku-Engkau). Dalam relasi Aku-Itu, kita memperlakukan orang lain sebagai benda yang digunakan, sebuah obyek yang dimanipulasikan. Ketidaktulusan adalah cara memelihara penampakan masing-masing. Adaapun dalam relasi Aku - Engkau, kita menghormati orang lain sebagai subyek, memperlakukannya sebagai pihak yang berharga, dan itu hanya bisa dilakukan melalui dialog. Bagi Buber, dialog adalah sinonim dari komunikasi yang etis (*ethical communication*) yang mempersyaratkan kehadiran pengungkapan diri (*self-disclosure*). Pemikiran tentang pengungkapan diri (Littlejohn, 1999) dilandasi oleh ideologi *honest*

communication yang mengajarkan bahwa tujuan komunikasi adalah memahami diri sendiri dan orang lain secara akurat, dan pemahaman tersebut hanya bisa berlangsung melalui komunikasi yang tulus (*genuine communication*).

Usaha setiap individu menciptakan komunikasi antarbudaya yang *mindful* pada awalnya akan dihadapkan pada situasi ketidakpastian (*uncertainty*) dan kecemasan (*anxiety*). Pemikiran teoritis yang berkaitan dengan ketidakpastian dan kecemasan adalah *Communication Apprehension* (CA—kecemasan berkomunikasi) dari McCroskey dan kawan-kawan. (Littlejohn, 1999, Lewis & Slade, 1994). Kecemasan berkomunikasi perlu dipahami sebagai variabel yang berjenjang dari tingkat kecemasan yang rendah menuju tingkat kecemasan yang tinggi. Kecemasan komunikasi yang normal bukan merupakan persoalan, tetapi kecemasan komunikasi yang tinggi merupakan hal yang serius, karena akan menciptakan persoalan pribadi yang serius pula, misalnya perilaku menghindari komunikasi.

Ketidakpastian dan kecemasan komunikasi perlu dikelola. Kemampuan mengelola kendala-kendala tersebut akan memberikan motivasi kepada setiap orang melakukan komunikasi antarbudaya yang efektif. Gagasan teoritis tentang pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan adalah *Anxiety/Uncertainty Management Theory* dari Gudykunst (Gudykunst & Mody, 2002, Griffin, 2000). Teori ini memfokuskan pada pertemuan kultural antara *in-groups* dengan *strangers*. Paling tidak satu orang dalam suatu pertemuan kultural adalah *stranger*. Melalui serangkaian krisis pada tahap-tahap awal, *stranger* tersebut akan mengalami kecemasan dan ketidakpastian tentang bagaimana ia harus berperilaku. Gudykunst menggunakan istilah *effective communication* untuk merujuk proses meminimalkan kesalahpahaman budaya. Komunikasi yang efektif dicerminkan oleh apakah kedua belah pihak dapat secara akurat memprediksikan dan menjelaskan perilaku masing-masing.

Gagasan teoritis lain yang berkaitan dengan usaha mengelola ketidakpastian dan kecemasan adalah *Identity Negotiation Theory* (Gudykunst & Mody, 2002, Ting-Toomey, 1999). Teori ini menekankan bahwa identitas (*reflective self-conception*) merupakan mekanisme eksplanatori dalam proses komunikasi antarbudaya. Artinya identitas dipandang sebagai citra diri reflektif yang dikonstruksikan, dialami, dan dikomunikasikan oleh setiap orang dalam situasi interaksi yang partikular. Adapun negosiasi merupakan proses interaksi ketika setiap orang dalam situasi

antarbudaya berusaha menegaskan, mendefinisikan, mengubah, mempertentangkan, dan/atau mendukung citra diri yang mereka inginkan. Asumsi utama dari *Identity Negotiation Theory* mengatakan bahwa *mindful intercultural communication* menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan antarbudaya yang penting, motivasi, dan kecakapan untuk bisa berkomunikasi secara memuaskan, layak, dan efektif.

Dalam studi komunikasi antarbudaya terdapat beberapa bangunan komunikasi yang masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap usaha memahami harmoni dan keterpaduan sosial. Bangunan komunikasi yang pertama dikenal dengan *third-culture* atau budaya ketiga (Dodd, 1998). Budaya ketiga diciptakan oleh partisipan A dan partisipan B. Mereka mengesampingkan budaya asal mereka guna memberikan penekanan pada landasan bersama. Dalam suatu kontak antarbudaya, mereka memfokuskan diri pada konstruksi budaya baru tersebut. Para partisipan tidak perlu memfusikan identitas kultural mereka, tetapi berusaha menciptakan arena bersama, paling tidak pada waktu mereka butuh berkomunikasi.

Gagasan yang berbeda tentang budaya ketiga diperkenalkan Casmir (dalam Deetz, 1993). Bangunan budaya ketiga ini berasumsi bahwa transaksi-transaksi antarbudaya dapat mencapai efektivitas optimal apabila para partisipan berusaha keras mengembangkan budaya ketiga, yaitu integrasi dari latar belakang kultural kedua individu yang menghasilkan pengalaman kultural baru dan berbeda, yaitu **pengalaman kultural yang diintegrasikan**.

Bangunan komunikasi lain adalah multikulturalisme, yaitu pengakuan terhadap beberapa kultur yang berbeda yang dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi pluralisme kultural (Suryadinata, 2000, Rogers & Steinfatt, 1999). Asumsi-asumsi pemikiran multikulturalisme bertentangan dengan konsep budaya ketiga (Shuter dalam Deetz, 1993), yaitu:

- 1) Negosiasi dan konvergensi kultural yang melekat dalam budaya ketiga merupakan *anathema* (hal yang ditabukan) oleh tujuan multikulturalisme yang berusaha mempertahankan dan mentransmisikan budaya yang tidak dapat diubah kekuatan-kekuatan relasional maupun eksternal.
- 2) Bila budaya ketiga mengedepankan sisi positif adaptasi kultural dalam suatu relasi, maka multikulturalisme berusaha memelihara identitas kultural dengan segala konsekuensinya.

- 3) Budaya ketiga merupakan sebuah proses *etic*, karena budaya ketiga menekankan kesamaan (*commonality*) alih-alih perbedaan (*difference*), dan berusaha menciptakan budaya baru guna mengakomodasikan perbedaan-perbedaan. Multikulturalisme, pada sisi yang lain, bersifat *emic* karena mempersyaratkan pemeliharaan yang tidak dapat diubah atas setiap budaya tentang nilai-nilai, *worldview*, dan pola-pola komunikasinya.

■ METODE PENELITIAN

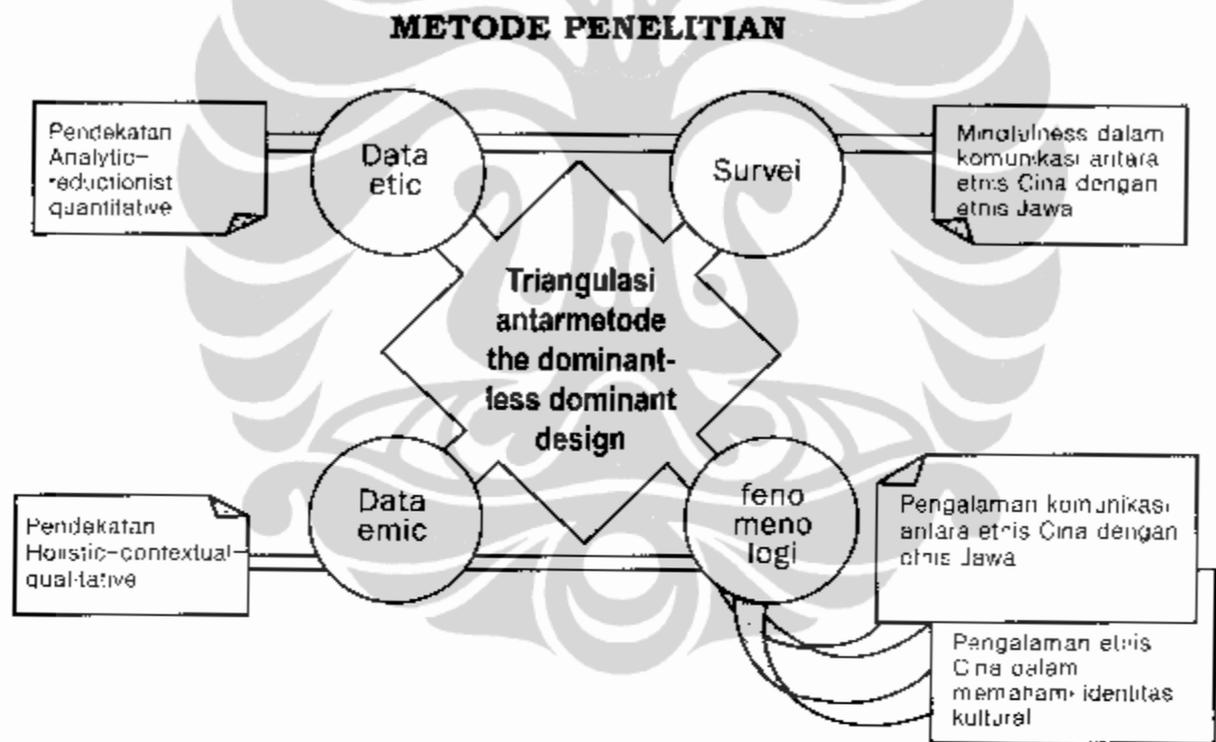
Studi ini merujuk gagasan paradigma interpretif dengan usaha memahami pengalaman individu-individu etnis Cina dan etnis Jawa sebagai pelaku sosial dalam menginterpretasikan hubungan antaretnis yang terjalin selama ini. Di samping itu, studi ini juga berusaha menjelaskan pengalaman etnis Cina dalam memahami identitas kulturalnya.

Metode yang dipakai dalam studi ini adalah *triangulasi*, yaitu kombinasi metodologi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji. Studi ini berusaha menerapkan triangulasi antarmetode (*inter-method triangulation*) dengan menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Penelitian survei ditujukan memperoleh data (*etic*) tentang efektivitas komunikasi antaretnis. Sedangkan penelitian kualitatif (fenomenologi) dilakukan untuk mendapatkan data (*emic*) tentang pengalaman komunikasi antaretnis dan pengakuan identitas kultural etnis Cina. Model triangulasi yang dipakai adalah *the dominant-less dominant design*, yaitu paradigma dominan (interpretif) dan dilengkapi satu komponen kecil dari paradigma alternatif (positivisme).

Studi ini penelitian dasar yang menggunakan tipe penelitian penjelasan (*explanation*) dan pemahaman (*understanding*), karena penelitian ini berusaha menjelaskan pola-pola dalam fenomena sosial yang dikaji, yaitu pengalaman komunikasi antaraetnis Cina dengan Jawa, baik sikap, perilaku, dan hubungan sosial kedua belah pihak. Strategi penelitian yang digunakan adalah *abduktif*, yaitu bagaimana komunikasi antaretnis dijelaskan para pelakunya. Juga, studi ini berusaha mengkonstruksikan bangunan komunikasi antarbudaya yang dapat menjadi sarana terciptanya situasi komunikasi yang *mindful*.

Subyek penelitian ini adalah individu-individu etnis Cina dan etnis Jawa yang bertempat tinggal di wilayah Sudiroprajan, Solo.

Secara konseptual, Solo dipilih sebagai wilayah penelitian dengan pertimbangan bahwa dalam skala kecil kota ini merupakan representasi masyarakat multietnis. Di samping itu di Solo sering terjadi konflik antaretnis. Dalam catatan sejarah, Solo merupakan kota yang pertama kali menciptakan peristiwa rasial anti-Cina. Adapun penetapan Sudiroprajan sebagai wilayah penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan permukiman itu memungkinkan individu-individu etnis Cina dan etnis Jawa berkomunikasi dengan intensitas yang relatif tinggi.



Satuan analisis (*unit of analysis*) dari studi ini adalah individu-individu dari setiap kelompok etnis yang menginterpretasikan pengalaman komunikasi antaretnis mereka. Di samping itu dengan mempertimbangkan bahwa pemahaman identitas kultural bukan hal yang baku (*fixed*), maka individu-individu etnis Cina diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur 30-an dan 60-an. Selain data pada tataran individual, studi ini juga berusaha mendapatkan data pada tataran kelembagaan. Lembaga-lembaga yang dilibatkan dalam studi ini adalah Persatuan Masyarakat Solo (PMS), Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB), dan Paguyuban Wong Solo (PWS). Dengan demikian, data yang diperoleh dari studi ini dikaji pada pelbagai tingkatan.

Data primer dari studi ini didapat melalui hasil wawancara mendalam dengan instrumen *indepth-interview*. Adapun data pendukung, yaitu data mengenai efektivitas komunikasi antaretnis,

diperoleh melalui wawancara dengan instrumen *questionnaire* dan instrumen *show card* guna memandu responden dalam memberikan jawaban sesuai dengan persepsinya. Data pendukung lain, yaitu data keterlibatan lembaga sebagai fasilitator komunikasi antaretnis diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penggiat lembaga-lembaga tersebut. Analisis terhadap data hasil survei dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata hitung (*mean*) pada tingkatan indikator, faktor, dan komponen yang diperoleh dari skala pada tangga persepsi (*show card*) antara kedua kelompok etnis, sedangkan analisis terhadap data kualitatif mengacu pada langkah-langkah dalam metode fenomenologi.

Kriteria tentang kualitas (*goodness*) yang dinilai adalah apakah studi ini memiliki *authenticity* atau tidak. Dengan merujuk pemikiran Schwandt (dalam Denzin & Lincoln, 2000), *authenticity* dapat diperoleh apabila peneliti dapat melakukan identifikasi empati (*emphatic identification*), yaitu sebuah tindakan untuk menghidupkan kembali secara psikologis pikiran pelaku (*actor*) guna memahami motif, keyakinan, keinginan, dan pikiran dari pelaku tersebut.

■ TEMUAN

Dalam catatan sejarah (Mulyadi dkk., 1999) permukiman di wilayah Sudiroprajan terbentuk sejak zaman pemerintah kolonial Belanda bersamaan dengan peristiwa pembunuhan massal terhadap etnis Cina di Batavia sekitar tahun 1745 yang dikenal dengan "Peristiwa Roa Malaka" atau "Keberingasan Batavia" (*Batavian Fury*) ketika tidak kurang dari 100.000 orang etnis Cina mati terbunuh. Solo atau tepatnya Kartasura yang pada waktu itu menjadi ibukota kerajaan menjadi tempat pelarian etnis Cina dari Batavia. Sunan Paku Buwono II yang memerintah Keraton Kartasura Hadiningrat sangat terbuka terhadap kehadiran etnis Cina yang menyelamatkan diri dari usaha pembunuhan massal tersebut (Yusiu Liem, 2000).

Sudiroprajan terletak di sebelah Utara Kali Pepe yang meliputi wilayah Ketandan, Limalasan, Balong, dan Warungpelem. Pemerintah kolonial Belanda sengaja melakukan kebijakan permukiman yang eksklusif dengan memanfaatkan sungai sebagai garis pembatas. Jika etnis Cina ditempatkan di sekitar Kali Pepe (wilayah Pasar Gede), maka keturunan Arab ditempatkan di sekitar Kali Wingko (wilayah Pasar Kliwon). Tujuan penetapan wilayah yang eksklusif ini adalah untuk menghambat interaksi antarkelompok etnis. Di bawah pemerintah kolonial Belanda, Sudiroprajan yang

menjadi tempat bermukim etnis Cina dipimpin oleh "Babah Mayor" yang bertugas sebagai penghubung antara orang Cina dengan pemerintah kolonial dalam pelbagai kepentingan. Dalam konteks kebudayaan, warga etnis Cina di Sudiroprajan diharuskan menjalankan kebiasaan kultural warisan leluhur sehingga identitas kultural mereka sebagai orang Cina masih tetap bisa dipertahankan.

Hal yang menonjol dari Sudiroprajan adalah bahwa sebagian besar etnis Cina yang bertempat tinggal di Solo, nenek moyangnya berasal dari Kampung Balong, salah satu bagian dari wilayah Sudiroprajan. Mayoritas warga etnis Cina di Sudiroprajan menjadi penganut agama Kristen atau Katholik sedangkan yang memeluk keyakinan Khonghucu sudah tidak banyak dijumpai. Dalam keseharian, mereka berbahasa Jawa atau bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang Jawa. Bahasa Cina (Mandarin) cenderung sudah tidak lagi mereka pahami, hanya orang Cina generasi tua saja yang relatif masih bisa berkomunikasi dengan memakai bahasa ini. Sudarmono, sejarawan UNS, menilai Sudiroprajan sebagai wilayah yang kondusif bagi hubungan antara etnis Cina dengan etnis Jawa, karena memungkinkan terjalinnya persaudaraan yang akrab antara warga dari kedua kelompok etnis tersebut. Dalam catatan pengamatan penulis, pergaulan di antara warga kedua kelompok etnis relatif sudah tidak tersekat secara sosial. Dalam keseharian mereka sering memanfaatkan *emper* (teras rumah) dan tempat-tempat publik seperti pos ronda dan warung kopi sebagai ruang sosial untuk membicarakan pelbagai hal yang mereka hadapi.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa:

- 1) Situasi komunikasi yang *mindful* dapat tercipta, karena warga kedua kelompok etnis di wilayah penelitian memiliki kompetensi komunikasi antarbudaya yang memadai, yaitu kemampuan mengintegrasikan aspek motivasi, pengetahuan, dan kecakapan yang memungkinkan mereka berkomunikasi secara layak, efektif, dan memuaskan. Perbedaan dalam lingkup etnisitas bukan menjadi kendala bagi hubungan mereka.
- 2) Faktor lain yang memberikan kontribusi terciptanya situasi komunikasi yang *mindful* adalah stereotip. Dalam tataran teoritis, stereotip dan juga etnosentrisme serta prasangka dipahami sebagai kendala dalam komunikasi antarbudaya, karena dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang secara kultural berbeda. Dalam kasus Sudiroprajan, meskipun masih muncul stereotip negatif yang

ditujukan kepada setiap kelompok etnis, pada tingkatan tertentu dan dalam kadar yang berbeda-beda, ternyata stereotip berguna membantu seseorang mengenali dan memahami perilaku orang lain.

- 3) Warga kedua kelompok etnis di wilayah penelitian memahami kekerasan massal yang diarahkan kepada warga etnis Cina bukan karena heterogenitas etnis, namun kecemburuan sosial yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, dan apa yang mereka sebut provokasi "pihak luar."
- 4) Lingkungan permukiman model kampung yang sudah terbentuk sejak awal berdirinya Sudiroprajan memungkinkan warga kedua kelompok etnis melakukan komunikasi antarbudaya yang lebih akrab.
- 5) Hubungan yang setara antara warga kedua kelompok etnis tecermin dari munculnya pengakuan terhadap karakteristik kultural setiap kelompok. Kondisi seperti ini merupakan wujud bangunan komunikasi multikulturalisme yang menegaskan perlunya komunikasi yang setara (*equal*) dan dengan sendirinya mengakui adanya perbedaan (*difference*).

DISKUSI

Mindfulness Dalam Komunikasi Antaretnis

Hasil survei menunjukkan gambaran obyektif bahwa situasi yang *mindful* tercipta dalam komunikasi antaretnis di wilayah penelitian. Indikasi terciptanya situasi komunikasi yang *mindful* terlihat dari tingginya kompetensi komunikasi individu-individu kedua kelompok etnis, yaitu kemampuan mereka mengintegrasikan komponen motivasi, pengetahuan, dan kecakapan sehingga bisa berkomunikasi secara layak, memuaskan, dan efektif.

Lingkungan permukiman yang tidak tersegregasi secara sosial memberikan kontribusi bagi terciptanya situasi komunikasi yang *mindful* tersebut, karena individu-individu kedua kelompok etnis tidak berada dalam keadaan terisolasi. Merujuk gagasan *Dynamic Social Impact Theory* (Latane dkk. dalam Littlejohn, 2002), mereka berinteraksi satu sama lain dalam sebuah ruang sosial (*social space*), yaitu "wilayah" yang memungkinkan mereka bertemu, berkomunikasi, dan saling mempengaruhi. Lingkungan permukiman di Sudiroprajan memungkinkan kontak antarkelompok etnis terjadi dalam intensitas tinggi. Kontak yang intensif pada gilirannya mengurangi kendala-kendala dalam komunikasi

antaretnis sebagaimana dinyatakan Gudykunst dan Kim (1997) dalam hipotesis mereka bahwa jika kontak berlangsung dalam kondisi yang menguntungkan (*equal status, intimate contact, rewarding contact*), kontak itu dapat menurunkan intensitas prasangka dan diskriminasi.

Permukiman di Sudiroprajan yang sudah lama terbentuk ikut memberikan kontribusi bagi munculnya apresiasi terhadap perbedaan kultural, karena setiap orang dari kedua kelompok etnis bisa saling mengenal dengan baik karakteristik kultural masing-masing. Faktor lain yang berpengaruh terhadap terciptanya situasi komunikasi yang *mindful* adalah stereotip. Meskipun secara konseptual stereotip merupakan faktor yang dapat mengganggu berlangsungnya komunikasi yang efektif (Lewis & Slade, 1994), dalam kasus Sudiroprajan, stereotip (negatif) yang ditujukan kepada setiap kelompok etnis pada tingkatan tertentu dan kadar yang berbeda-beda ternyata bermanfaat membantu individu mengenali dan memahami perilaku komunikasi individu kelompok etnis lain, dan juga bisa digunakan memprediksi dan mengantisipasi perilaku komunikasi individu itu.

■ **Pengalaman Komunikasi Antaretnis**

Pengakuan para informan etnis Cina dan etnis Jawa generasi 60-an dan 30-an menegaskan bahwa komunikasi di antara warga kedua kelompok etnis berlangsung dalam intensitas tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana diuraikan di atas adalah lingkungan permukiman yang tidak tersegregasi seperti di "pecinan," "kauman," atau "kampung Arab." Dengan kata lain, "ruang" menjadi salah satu faktor determinan bagi berlangsungnya komunikasi antaretnis yang intensif. Sudiroprajan adalah "ruang" yang memungkinkan penduduknya bertetangga secara akrab.

Munculnya persepsi bahwa warga etnis Cina yang bertempat tinggal di dalam kampung bisa lebih akrab daripada mereka yang berumah di pinggir jalan sekali lagi menunjukkan peran penting lingkungan permukiman. Faktor "tak terhindarkan" yang lebih kuat pada jarak yang lebih rapat (permukiman model kampung) membuat warga kedua kelompok etnis mempertimbangkan pilihan antara ego kelompok etnis atau ketenangan, keamanan, dan kenyamanan hidup. Lingkungan permukiman kampung membuat wilayah tempat tinggal menjadi terbatas, sehingga orang menjadikan tetangganya sebagai "pagar" untuk mempertahankan keamanan teritorialnya. Sebaliknya mereka yang "berumah di luar kampung"

mentransformasikan “pagar” dalam bentuk harfiah seperti tembok yang tinggi atau pintu dengan banyak gerendel.

Semua informan menegaskan bahwa komunikasi antarwarga kedua kelompok etnis berlangsung dalam suasana akrab, meskipun penggiat salah satu lembaga mediasi komunikasi antaretnis menilainya paradoksal. Artinya mereka bisa akrab karena sama-sama berada dalam strata sosial-ekonomi yang setara. Dalam perspektif psikologi (komunikasi), suasana pergaulan antaretnis yang akrab menunjukkan bahwa tingkat kecemasan komunikasi (*communication apprehension*) mereka berada pada tingkat yang rendah. Mereka bisa memberikan apresiasi terhadap perbedaan-perbedaan kultural. Adapun dalam cara pandang sosiologis, keakraban yang terjalin menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat Sudiroprajan masih bersifat paguyuban (*gemeinschaft*). Artinya hubungan sosial di antara warga kedua kelompok etnis terjadi secara spontan dan afektif.

❖ **Persoalan Pengakuan Identitas Kultural**

Dalam pemahaman para informan, konflik rasial dipicu oleh dua persoalan utama, yaitu kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik yang diprovokasi pihak luar. Kedua faktor tersebut, sudah menjadi pemahaman yang berlaku umum di Sudiroprajan. Namun demikian, konflik rasial yang terjadi berulang kali hampir tidak pernah menyentuh wilayah Sudiroprajan. Dalam kasus Sudiroprajan, secara horisontal perbedaan dalam konteks etnisitas bukan lagi dianggap sebagai persoalan yang krusial, sehingga konflik vertikal yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dapat dicegah secara maksimal. Penyebab konflik dipahami sebagai faktor yang datang dari luar (*exogenous*), bukan masyarakat itu sendiri (*endogenous*).

Asimilasi, menurut para informan, seharusnya dijalankan secara alami, sukarela, dan tidak pula dipaksakan melalui pelbagai kebijakan pemerintah yang represif. Mereka secara tegas tidak setuju dengan program asimilasi yang pernah dijalankan pada masa Orde Baru yang melarang pelbagai ekspresi identitas kultural etnis Cina. Merujuk gagasan Jary & Jary (1991), asimilasi yang diarahkan bagi kelompok minoritas untuk mengadopsi nilai-nilai dan pola-pola kehidupan dari kelompok mayoritas (*host culture*) akan membawa kerugian ketika prosesnya berjalan secara tidak terbuka atau tidak sukarela. Sebab, menghilangkan identitas asal merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, karena pada dasarnya identitas itu sendiri

sudah menjadi semacam keyakinan ideologis.

Perkawinan campur, dalam kasus Sudiroprajan, sudah menjadi realitas sosial yang lumrah. Hal yang menjadi penekanan dalam perkawinan campur di Sudiroprajan adalah kesamaan keyakinan agama dan kesediaan menerima perbedaan dalam konteks etnisitas. Fenomena lain yang menonjol adalah bahwa perkawinan campur di Sudiroprajan banyak terjadi di kalangan strata sosial-ekonomi bawah dan lingkup pergaulan yang terbatas, sehingga mereka yang akan menikah sudah saling mengenal sebelumnya. Semua gejala sosial ini memperlihatkan bahwa perkawinan campur memiliki pola *homogamy* (Thio, 1989). Artinya pasangan yang akan melangsungkan pernikahan menghendaki kesamaan-kesamaan dalam karakteristik sosial, seperti kelas sosial, rasial, dan keyakinan agama.

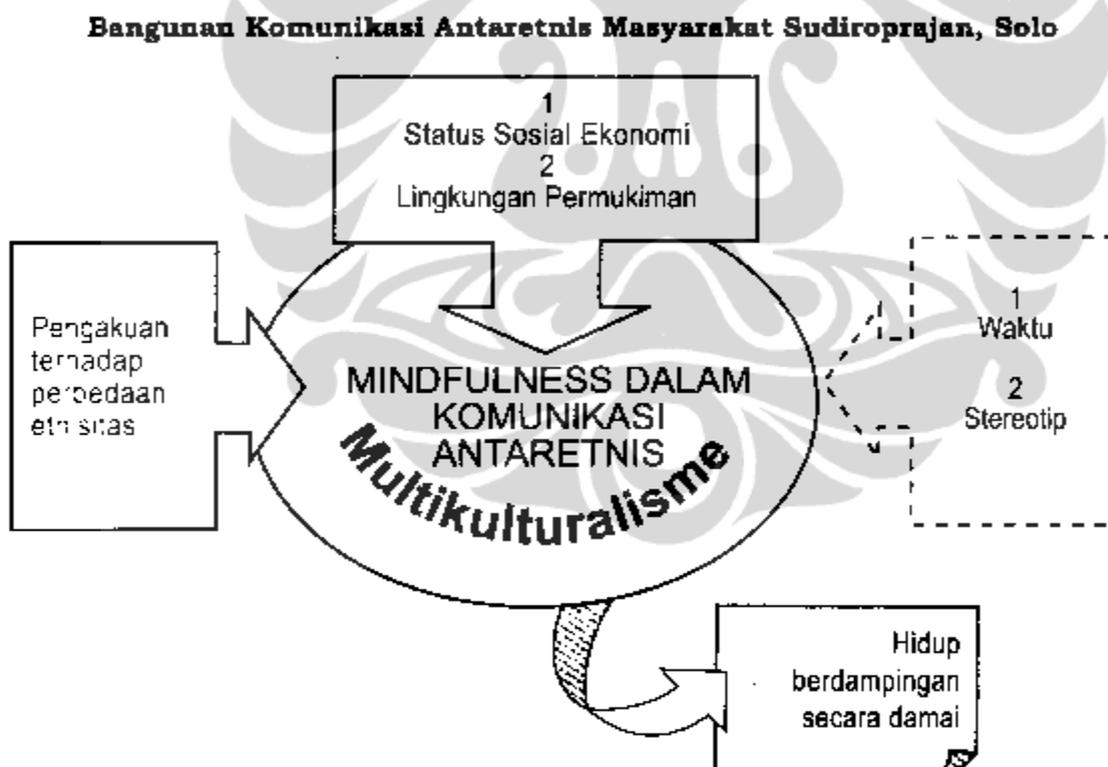
Para informan etnis Cina generasi 60-an dan 30-an menegaskan diri mereka sebagai "orang Indonesia," karena merasa sudah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir. Penegasan tersebut bermakna bahwa persoalan yang berkaitan dengan pengakuan identitas dan eksistensi etnis Cina sebenarnya sudah tidak lagi menjadi wacana yang serius diperbincangkan, sejak mereka mengaku dan diakui sebagai warga negara Indonesia, paling tidak pengakuan yang diberikan komunitas etnis Jawa di lingkungan permukiman mereka. Merujuk gagasan *Identity Negotiation Theory* (Gudykunst, 2002, Ting-Toomey, 1999), pengakuan yang diberikan terhadap identitas kultural etnis Cina merupakan hasil negosiasi, yaitu proses interaksi ketika setiap orang yang berada pada situasi antarbudaya berusaha menegaskan, mendefinisikan, mengubah, mempertentangkan, dan/atau mendukung citra diri yang diinginkan. Dalam praktiknya, negosiasi identitas membutuhkan waktu yang relatif lama.

/// **Bangunan Komunikasi Antaretnis**

Dalam konteks bangunan komunikasi yang bisa menjadi sarana pergaulan antaretnis yang setara, ada semacam "kesepakatan" di antara para informan bahwa dalam berkomunikasi warga etnis Jawa dan etnis Cina perlu menghargai perbedaan kultural masing-masing. Sebab, tujuan komunikasi dalam tingkat kewargaan adalah menciptakan persaudaraan dan menghormati keberadaan setiap kelompok yang tidak mungkin diseragamkan.

Realitas Sudiroprajan secara konseptual merupakan wujud bangunan komunikasi *salad bowl* atau *tossed salad* (Rogers & Steinfatt, 1999), yaitu setiap orang dari kelompok yang berbeda tetap memelihara budaya asli mereka (atau paling tidak sebagian besar

budaya mereka) dan pada saat yang sama berusaha beradaptasi dengan budaya kelompok lain. Bahkan, merujuk istilah yang dipakai Kleden (dalam Koekerits, 2001), di Sudiroprajan telah muncul “fertilisasi silang” dalam hal pandangan, kebiasaan, dan nilai-nilai kultural yang berlainan dalam proses komunikasi antarbudaya yang selama ini berlangsung. Ini tidak berarti bahwa toleransi antarwarga yang terbentuk melahirkan penyeragaman, karena dalam kenyataan warga kedua kelompok etnis menyadari benar bahwa di antara mereka tetap memiliki perbedaan identitas kultural. Sikap toleran antarwarga yang tetap dijaga itulah menandai bahwa di Sudiroprajan menunjukkan adanya karakteristik masyarakat yang multikultural.



Dalam tataran teoritis, multikulturalisme justru bertentangan dengan konsep bangsa Indonesia yang didasarkan pada model *indigenous* yang bermakna bahwa semua kelompok etnis Indonesia adalah *indigenous*, sedangkan etnis Cina dipahami sebagai *foreigner*. Dengan demikian, jika warga etnis Cina ingin menjadi orang Indonesia, mereka harus terasimilasi ke dalam populasi pribumi (*native population*). Inilah konsep yang dikenal dengan *asimilasi inkorporasi*. Konsep yang lebih dekat dengan moto bangsa Indonesia—“Bhinneka Tunggal Ika” (*Unity in Diversity*)—adalah *asimilasi amalgamasi* yang berarti dua kelompok atau lebih bersatu membentuk kelompok baru. Inilah model Budaya Ketiga (*Third-Culture*) yang diperkenalkan Casmir (dalam Deetz, 1993). Ia berasumsi bahwa transaksi

antarbudaya dapat mencapai efektivitas yang optimal bila para partisipan berusaha sungguh-sungguh mengembangkan Budaya Ketiga, yaitu integrasi latar belakang kultural kedua belah pihak yang menghasilkan sebuah pengalaman baru dan berbeda, yaitu pengalaman yang diintegrasikan.

■ IMPLIKASI

1. Konsep SARA yang diperkenalkan pada masa pemerintah Orde Baru yang pada akhirnya secara hegemonis menguasai kesadaran masyarakat tidak selamanya merupakan persoalan murni akibat keberagaman primordial. SARA muncul menjadi persoalan ketika terjadi kesenjangan ekonomi-politik. Mencermati realitas semacam ini, maka pemerintah tidak selayaknya melakukan penyatuan dengan cara represif sebagai akibat keberagaman primordial, misalnya kebijakan asimilasi. Integrasi terhadap keberagaman kultural perlu dilakukan melalui komunikasi yang persuasif dengan tetap mempertahankan konteks kebudayaan setempat.
2. Lingkungan permukiman yang secara arsitektural tecermin dalam wujud kampung dan penduduk yang tidak tersegregasi secara sosial memungkinkan terciptanya situasi komunikasi antaretnis yang *mindful*. Namun demikian, tidak bisa diharapkan bahwa lingkungan permukiman semacam itu ada dimana-mana atau diterapkan di banyak wilayah. Dengan demikian, faktor yang masih mempunyai peran dominan adalah kecakapan atau kompetensi komunikasi yang perlu dimiliki setiap orang dalam situasi antarkultural. Oleh karena itu, pelbagai gagasan atau kebijakan yang dapat memberikan dan memperluas pengetahuan tentang kompetensi komunikasi antarbudaya seperti pendidikan atau pelatihan komunikasi antarbudaya (*intercultural communication training*) perlu ditanggapi secara positif.
3. Bangunan komunikasi antarbudaya yang dapat dikonstruksikan di wilayah penelitian adalah bangunan multikulturalisme yang karakteristiknya terlihat dari kemampuan warga kedua kelompok memberikan apresiasi terhadap perbedaan-perbedaan kultural. Namun demikian, bangunan multikulturalisme ini bertentangan dengan konsep bangsa Indonesia yang menekankan model *indigenous* (pribumi-orang asing). Secara teoritis konstruksi model yang lebih dekat dengan konsep "Bhinneka Tunggal Ika" adalah Budaya Ketiga (*Third-Culture*), yaitu model yang menekankan

integrasi antara dua kelompok kultural atau lebih ke dalam sebuah kelompok baru.

4. Bangunan teoritis yang membahas *mindfulness* dalam komunikasi antarbudaya seperti *Anxiety/Uncertainty Management Theory* (Gudykunst), *Mindful Intercultural Model* (Ting-Toomey), dan *Model of Intercultural Communication* (Carley H. Dodd) masih sebatas menawarkan gagasan yang berkaitan dengan faktor-faktor komunikasi, yaitu motivasi, pengetahuan, dan kecakapan. Berdasarkan hasil studi, maka cakupan teoritis (*theoretical scope*) bangunan komunikasi antarbudaya perlu diperluas dengan mempertimbangkan faktor lingkungan permukiman dan faktor sosial-ekonomi penduduk sebagai hal yang dapat memberikan kontribusi terciptanya situasi komunikasi yang *mindful*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Appiah, K. Anthony. "Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction," dalam Amy Gutmann (ed.), *Multiculturalism*. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1994.
- Belay, Getinet. "Toward a Paradigm Shift for Intercultural and International Communication: New Research Directions," dalam Stanley A. Deetz (ed.), *Communication Year Book/16*. Newbury Park, California, SAGE Publications, 1993.
- Beng, Tan Chee. Komentari "Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asians?" dalam Leo Suryadinata (ed.), *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 1997.
- Blaikie, Norman. *Designing Social Research, The Logic of Anticipation*. Malden, MA, Polity Press, 2000.
- Bloomfield, David & Ben Reilly. "Perubahan Sifat Konflik dan Pengelolaan Konflik," dalam Peter Harris & Ben Reilly (ed.), *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. International IDEA, Jakarta, 2000.
- Casimir, Fred L., "Third-Culture Building: A Paradigm Shift for International and Intercultural Communication," dalam Stanley A. Deetz (ed.), *Communication Year Book/16*. Newbury Park, California, SAGE Publications, 1993.
- Charles A. Coppel. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Creswell, John W., *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 1994.
- Dahrendorf, Ralf. "Toward A Theory of Social Conflict," dalam Donald

- McQuaire, *Readings in Contemporary Sociological Theory: From Modernity to Post-Modernity*. New Jersey, Prentice Hall, 1995.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. "Entering the Field of Qualitative Research," dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 1994.
- Dodd, Carley H. *Dynamics of Intercultural Communication (Fifth Edition)*. McGraw-Hill, New York, 1998.
- Donny Gahral Adian. *Pilar-pilar Filsafat Kontemporer*. Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2002.
- E. Kristi Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), Fakultas Psikologi. Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Griffin, Em. *A First Look At Communication Theory (Fourth Edition)*. McGraw-Hill, New York, 2000.
- Guba, Egon G., Yvonna S. Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research," dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 1994.
- Gudykunst, William B., "Intercultural Communication Theories," dalam William B. Gudykunst, Bella Mody (ed.), *Handbook of International and Intercultural Communication (Second Edition)*, Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 2002.
- Gudykunst, William B., "Issues in Cross-Cultural Communication Research," dalam William B. Gudykunst, Bella Mody (ed.), *Handbook of International and Intercultural Communication (Second Edition)*, Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 2002.
- Gudykunst, William B. & Tsukasa Nishida, "Theoretical Perspective for Studying Intercultural Communication," dalam Molefi K. Asante, William B. Gudykunst (ed.), *Handbook of International and Intercultural Communication*, Newbury Park, California, SAGE Publications, Inc., 1989.
- Gudykunst, William B., "Cross-Cultural Comparisons," dalam Charles R. Berger & Steven H. Chaffee (ed.), *Handbook of Communication Science*. Newbury Park, California, SAGE Publications, Inc., 1987.
- Gudykunst, William B & Young Yun Kim. *Communication With Strangers, An Approach to Intercultural Communication (Third Edition)*, McGraw-Hill, New York, 1997.
- Heru Nugroho. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2000.
- I. Wibowo. "Catatan Pendahuluan," dalam I. Wibowo (ed.), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Ignas Kleden. "Toleransi: Keindahan Budaya dan Risiko Politikanya," dalam T. Jakob Koekerits (ed.), *Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia*, Jakarta, Kompas, 2001.
- Infante, Dominick A., Andrew S. Rancer, Deanna F. Womack. *Building Com-*

- communication Theory. Illinois, Waveland Press, Inc., 1990.
- Jandt, Fred E. *Intercultural Communication, An Introduction (Second Edition)*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 1998.
- Jary, David & Julia Jary. *Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow, Harper Collins Publishers, 1991.
- K. Bertens. *Filsafat Barat Abad XX Inggris – Jerman*. Jakarta, PT Gramedia, 1990.
- K. Bertens. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris – Jerman*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Kim, Young Yun. "Unum vs. Pluribus: Ideology and Differing Academic Conceptions of Ethnic Identity," dalam William B. Gudykunst (ed.), *Communication Yearbook 26*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, Mahwah, NJ, 2002.
- Leo Suryadinata. "Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asians?" dalam Leo Suryadinata (ed.), *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 1997.
- Lewis, Glen, Christina Slade. *Critical Communication*. Australia, Prentice Hall, 1994.
- Lincoln, Yvonna S., Egon G. Guba. "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences," dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 2000.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication (Sixth Edition)*. Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1999.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication (Seventh Edition)*. Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 2002.
- Mely G. Tan. "The Ethnic Chinese in Indonesia: Issues of Identity," dalam Leo Suryadinata (ed.), *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 1997.
- Mohamad Sobary & Thung Ju Lan. "Membangun Jaringan Sosial Dari Bawah: Strategi Memecahkan Masalah Relasi Antaretnis "Pasca Kerusuhan" di Solo," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI, 1999.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. London, SAGE Publications, Inc., 1994.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches (Third Edition)*. Massachusetts, Allyn and Bacon A Viacom Company, 1997.
- Ongkokham. "Exhorbitante Rechten Gubernur Jenderal," dalam Candra Gautama (ed.), *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong*. Jakarta, PT Gramedia, 2002.
- O'Sullivan, Tim (ed.). *Key Concepts in Communication and Cultural Studies*. New York, Routledge, 1994.
- Parsudi Suparlan. "Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antarsukubangsa," dalam I. Wibowo (ed.), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,

1999.

- Payne, Michael (ed.). *A Dictionary of Cultural and Critical Theory*. Oxford, Blackwell Reference, 1996.
- Perdue, William D. *Sociological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology*. Palo Alto, California, Mayfield Publishing Company, 1986.
- Rene L. Pattiradjawane. "Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia," dalam I. Wibowo (ed.), *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rogers, Everett M., Thomas M. Steinfatt. *Intercultural Communication*. Illinois, Waveland Press, Inc., 1999.
- Rizal Sukma. "Masalah Cina Dalam Kerangka Hubungan Indonesia - RRC," dalam I. Wibowo (ed.), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Ruben, Brent D. & Lea P. Stewart. *Communication and Human Behavior (Fourth Edition)*. Needham Heights, MA, Allyn & Bacon A Viacom Company, 1998.
- Samovar, Larry A., Richard E. Porter, Nemi C. Jain. *Understanding Intercultural Communication*. Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1981.
- Saral, Tulusi B. "The Conscious Theory of Intercultural Communication," dalam Molefi K. Asante, Eileen Newmark, Cecil A. Blake (ed.), *Handbook of Intercultural Communication*. Beverly Hills, California, SAGE Publications, Inc., 1979.
- Sarantakos, Sotirios. *Social Research*. South Melbourne, Australia, Macmillan Education, 1993.
- Schement, Jorge Reina (ed.). *Encyclopedia of Communication and Information (Volume 1)*. New York, Macmillan Reference USA, 2002.
- Schwandt, Thomas A. "Three Epistemological Stances for Qualitative Inquiry," dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 2000.
- Shuter, Robert. "On Third-Culture Building," dalam Stanley A. Deetz (ed.), *Communication Year Book/16*. Newbury Park, California, SAGE Publications, 1993.
- Stanley Prasetyo Adi. "Rasisme dan Rasialisme: Antara Keilmuan dan Stereotip Sosial yang Selalu Salah Kaprah," dalam *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman*, Jakarta, Lembaga Studi Pers & Pembangunan (LSPP), 1999.
- Tarmizi Taher. *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia*. Jakarta, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 1997.
- Thio, Alex. *Sociology, An Introduction (Second Edition)*. New York, Harper & Row Publishers, 1989.
- Thung Ju Lan. "Tinjauan Kepustakaan tentang Etnis Cina di Indonesia," dalam I. Wibowo (ed.), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Thung Ju Lan. "Susahnya Jadi Orang Cina: Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial," dalam I. Wibowo (ed.), *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergaulan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ting-Toomey, Stella. *Communicating Across Cultures*. New York, The Guilford Publications, Inc., 1999.
- Tom Campbell. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1994.
- Wiseman, Richard L., "Intercultural Communication Competence," dalam William B. Gudykunst, Bella Mody (ed.), *Handbook of International and Intercultural Communication (Second Edition)*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 2002.
- Yusiu Liem. *Prasangka terhadap Etnis Cina, Sebuah Intisari*. Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000.

❖ **Artikel**

- Alex Lanur. "Hubungan Antarpribadi," dalam *Majalah Filsafat Driyarkara*, Tahun XIX No. 2, 1992/1993.
- Bambang Setiawan. "Tionghoa: Dialektika Sebuah Etnis," dalam *Harian Kompas*, 14 Maret 2001.
- Coppel, Charles A. "Historical Impediments to the Acceptance of Ethnic Chinese in a Multicultural Indonesia," dalam *Simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Udayana, Bali, 2002.
- Jakob Oetama. "Sulitnya Berkomunikasi Dalam Masyarakat yang Tidak Tulus," dalam *Majalah Kebudayaan Basis*, No. 05 - 06, Tahun ke 49, Mei - Juni, 2000.
- Jannes Eudes Wawa. "Konflik Antaretnis, Ujian Bagi Budaya Lokal," dalam *Harian Kompas*, 21 Maret 2001.
- Kathryn Robinson. "Ketegangan Antaretnis, Orang Bugis dan Masalah 'Penjelasan'," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 63 Tahun XXIV, September-Desember, 2000.
- Maria Hartiningsih. "Asimilasionisme vs Multikulturalisme," dalam *Harian Kompas*, 14 Maret 2001.
- Paulus Widlyanto. "Kerusuhan dan Masalah SARA," dalam *Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial Prisma*, No. 1 Tahun XXVII, September-Oktober, 1998.
- Parsudi Suparlan. "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 63 Tahun XXIV, September-Desember, 2000.
- Parsudi Suparlan. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam *Simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Udayana, Bali, 2002.
- Sindhunata. "Pekerjaan Rumah untuk Otonomi Daerah," dalam *Majalah Kebudayaan Basis*, No. 09 - 10 Tahun ke 49, September-Oktober, 2000.
- Suryadinata, Leo. "Indonesian State Policy toward Ethnic Chinese: From Assimilation to Multiculturalism?" dalam *Simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Udayana, Bali, 2002.
- Usman Pelly. "Akar Kerusakan Etnis di Indonesia," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXIII No. 58, Januari - April 1999.